

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyansyah, Indra Widhi. 2005. “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003”. *Skripsi tidak dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Felita, Alda. 2006. “Analisa Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Okupansi Kamar Hotel Berbintang terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Surabaya”. *Skripsi tidak dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudarajad, 2004. “Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang”. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. Tentang pajak adalah satu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa langsung yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Masrofi, Muhamad. 2004. “Potensi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.” Thesis S-2 Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro”.
- Muqqadas, A. Azinar, A. Karim Saleh, dan Madris. 2011. “Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Parepare”. Parepare.
- Nugradi, Eko Wahyu., dan Aisma Syamsi. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Daerah Kota Medan”, dalam *Jurnal Visi*

Ekonomi. Vol 10, No 01. Medan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Medan

Nugraha dan Arvian Triantoro. 2004. “Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”.
Jurusan Ilmu Administrasi Vol. 4, No.1.

Nugraha, Satria Adi. 2012. “Analisis Pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perimaan Pajak Hotel Pada di Kota Semarang (Tahun 2001-2010). Skripsi S-1
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro. Semarang

Nuryani, Sri Endah. 2010. “Analisis Pajak Hotel di Kabupaten Badung”. Universitas
Indonesia. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011. Tentang Pajak Hotel. Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011. Tentang Pajak Hotel. Bagian
Hukum Setda Kota Semarang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah.
Departemen Dalam Negeri.

Purnomo. 2009. “Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan
berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah”.

Qadarrochman, Nasrul. 2010. “Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di
Kota Semarang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. *Skripsi
tidak dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Semarang.

Rahayu, Betty. 2011. “Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul.” Skripsi S-
1 Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Diponegoro

- Sabartini, Rifqy, 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.” Skripsi S-1 Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang
- Sasongko, 2009. “Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat”.
- Siahan, 2005. “Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia”.
- Sofian, 1997. “Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah”.
- Sudarsono, 1994. “Iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya”.
- Suhendi, Eno. 2008. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Yogyakarta (Tahun 1991-2005)”. *Skripsi tidak dipublikasikan*, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Soemitro, 2002. *Tentang pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak dapat mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan.*
- Undang-Undang Pajak Daerah Kota Semarang Nomor Tiga Tahun 2011 Tentang *Pajak Hotel subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah.* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Program Pembangunan Nasional*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 tentang *sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.